

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang dilakukan pada BAB sebelumnya, berikut ini adalah kesimpulan dari hasil peneliti lakukan:

1. Dari pengangkatan anak bagi orangtua angkat, melainkan untuk para pihak dalam pengangkatan anak hampir sama dan seragam sebagaimana tertuang dalam perkara permohonan dan putusan Pengadilan Agama, namun ada makna tersirat lainnya yang berbeda, yaitu ingin membantu pengasuhan anak (pendidikan, kesehatan dan depannya), membantu pihak orangtua kandung yang terbebani dengan ekonomi dalam pengasuhan anaknya, membantu pihak orangtua angkat yang kesepian tidak memiliki anak, agar ada yang masuk menjadi daftar penerima tunjangannya sebagai PNS, menjadi pemantik (pemancing) lahirnya anak dari orangtua angkat, menjadi pembangkit semangat dalam berusaha bagi keluarga orangtua angkat.
2. Di dalam KUH Perdata anak angkat disamakan statusnya dengan anak kandung, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas membedakannya. Hal tersebut disebabkan karena pengangkatan anak dalam KHI tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Menurut KUH Perdata bagi anak angkat sama dengan bagi anak kandung. Sedangkan di dalam KHI anak angkat mendapatkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya (Pasal 209 KHI) terkecuali telah mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli warisnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran dalam penelitian:

1. Kepada para pihak dalam pengangkat anak, dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.
2. Pengaturan mengenai pembagian warisan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam mengalami banyak perbedaan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat di Indonesia yang beragam, sehingga hukum yang diterapkan pun berbeda, hal tersebut menyebabkan tidak mungkin terjadi unifikasi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Majid Husen, dkk, Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam, Terj, Ahmad Bakri, (Jakarta: Pustaka Sadra, 2004).

Arif Gosita, (1989) Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo.

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2008).

Basyir Azhar, Hukum Adat Bagi Ummat Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1986).

B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari, (Jakarta: Rajawali, 1989)

Fauzan, Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, No.X.

IdrisRamulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Ismuha, Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

Koesnan R. A. Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung: Sumur).

Mulyadi Lilik, Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktikdan Permasalahannya. (Bandung: Mandar Maju, 2005),

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Muhammad Shahrur, “Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami”, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004),

Prodjodikoro, Wirjono. 1983. Hukum Waris di Indonesia. Bandung: Sumur.

Pandika Rusli, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

R. Subektidan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

Saimin Soedaryo. (2002). Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparman Usmandan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008),

Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris, Puionir Jaya, Bandung, 1972.

Zaini, Muderis. (1995). Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).

C. Internet

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Pasal 39 Ayat 1.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Pasal 39 Ayat 2.

Pasal 171 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Pasal 173 berbunyi: *seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan*

bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

D. SumberLain

Fauzan, *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, No.X.

Peraturan Pemerintah Indonesia No. 54 Tahun 2007 *Tentang Pelaksanaan PengangkatanAnak*.

Linda Fri Filia, *Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Skripsi Universitas Andalas Padang: Fak. Hukum. 2011).

YuniPujiHaryati, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat (Studi di Kabupaten Wonosobo)* (Tesis Universitas Diponegoro Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, 2010).

H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002).

Peter Mahmud Marzuki. *Peneltian Hukum*, Cet ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1994).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet 12, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)